



KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM

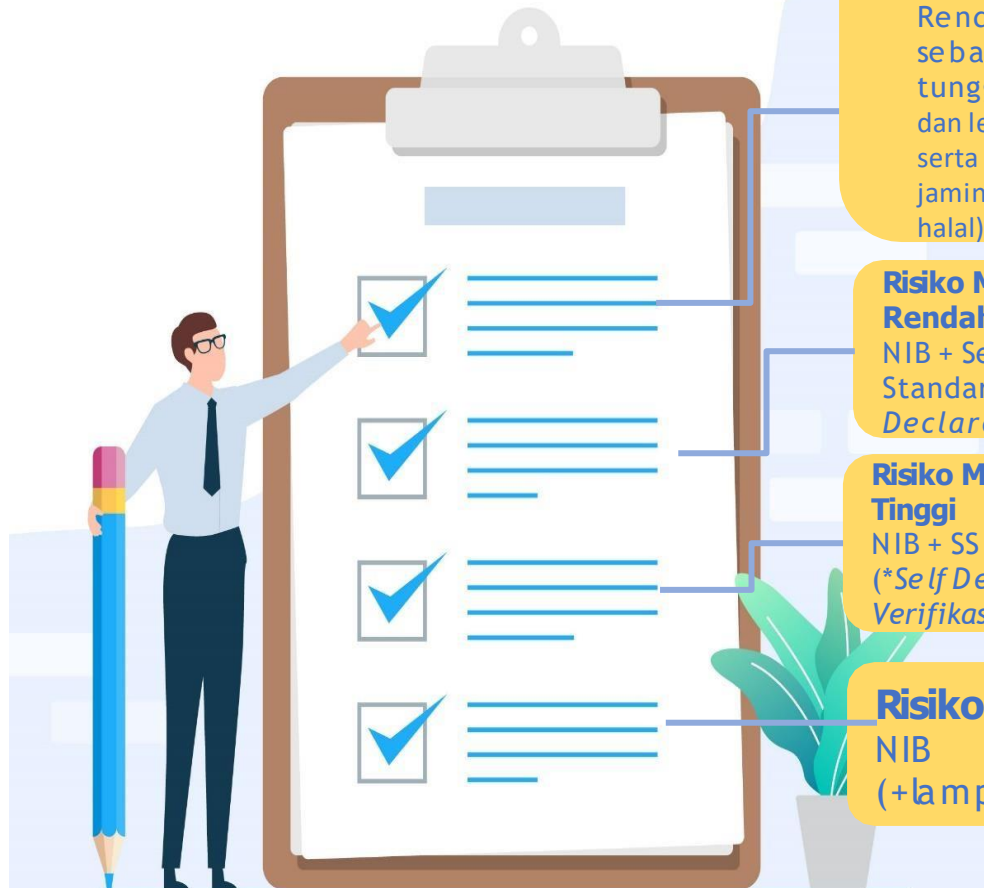
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

DIREKTORAT SISTEM PERIZINAN BERUSAHA,
KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM



Perizinan Berusaha

Proses perizinan kegiatan berusaha diubah dari berbasis izin ke risiko



Risiko Rendah

- ✓ Cukup Nomor Induk Berusaha (NIB)
- ✓ UMK Risiko Rendah, NIB sebagai perizinan tunggal (identitas dan legalitas, SNI, serta sertifikasi jaminan produk halal)

Risiko Menengah Rendah

NIB + Sertifikat Standar (SS) (*Self Declare)

Risiko Menengah Tinggi

NIB + SS (*Self Declare & Verifikasi)

Risiko Tinggi

NIB + Izin (+lampiran teknis)



- SNI berupa Sertifikat Bina UMK selanjutnya akan dilakukan pendampingan/fasilitasi oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN)
- SJPH selanjutnya ditindaklanjuti dengan pendampingan/ fasilitasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama

Penerbitan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS oleh :

- Lembaga OSS
- Lembaga OSS atas nama Menteri/kepala Lembaga
- Kepala DPMPSTSP Provinsi atas nama Gubernur
- Kepala DPMPSTSP Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota
- Administrator KEK
- Badan Pengusahaan KPBPB

Catatan :

- PB Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU), dapat diajukan oleh PU jika diperlukan
- Persyaratan Dasar : KKPR, Persetujuan Lingkungan, PBG+SLF

Kategori Pelaku Usaha



Online Single Submission (OSS)

berbasis risiko memberikan layanan bagi pelaku usaha yang terbagi ke dalam kedua kelompok besar, yaitu Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Non Usaha Mikro Kecil (Non UMK)

Pendaftaran Akun

1 Skala Usaha | 2 Verifikasi Data | 3 Kata Sandi | 4 Profil Pelaku Usaha

Pilih Skala Usaha

UMK **Non UMK**

UMK
Modal usaha ≤ Rp5 miliar
Untuk usaha orang perseorangan atau badan usaha milik WNI dengan modal maksimal Rp5 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan).

Non UMK
Modal usaha > Rp5 miliar
Untuk usaha orang perseorangan atau badan usaha dengan modal awal lebih dari Rp5 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan).

Lanjut

Sudah punya akun? [Masuk](#)

Penjelasan PP 7/2021 Pasal 35

Ayat 2 Modal usaha merupakan

modal sendiri dan modal pinjaman untuk menjalankan kegiatan usaha.

Skala Usaha – UMK



Skala Usaha – Non UMK

Usaha milik Warga Negara Indonesia, baik orang perseorangan maupun badan usaha, dengan modal usaha lebih dari Rp5 miliar sampai dengan paling banyak Rp10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

MENENGAH

Badan usaha milik Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan modal usaha lebih dari Rp10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

BESAR

Orang perseorangan warga negara Indonesia atau asing, atau badan usaha yang merupakan perwakilan pelaku usaha dari luar negeri dengan persetujuan pendirian kantor di wilayah Indonesia.

KANTOR PERWAKILAN

Badan usaha asing yang didirikan di luar wilayah Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

BULN

Skala Usaha – UMK

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) adalah usaha milik Warga Negara Indonesia (WNI), baik orang perseorangan maupun badan usaha, dengan modal usaha maksimal Rp 5 miliar, **tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha**. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat perubahan kriteria modal usaha UMK sebagai berikut:



NOTE :

Pelaku Usaha UMK Perseorangan dalam permohonannya dapat menggunakan Mobile App, dengan mendownload App **OSS INDONESIA** di Play Store (Android) dan App Store (iPhone). Dibutuhkan NIK (e-KTP) dan no ponsel yang sudah ada whatsapp (wa)

Pelaksanaan Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS



1 Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha

- 1) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (daratan, laut, dan/atau kawasan hutan)
- 2) Persetujuan Lingkungan
- 3) Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) & Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
 - Bila pelaku usaha memerlukan bangunan Gedung, maka wajib memiliki PBG & SLF
 - PBG & SLF bukan prasyarat terbitnya NIB, Sertifikat Standar dan Izin.

NOTE :

*KKPR untuk UMK diatur pada PP 21 Tahun 2021 Pasal 115

Paragraf 115

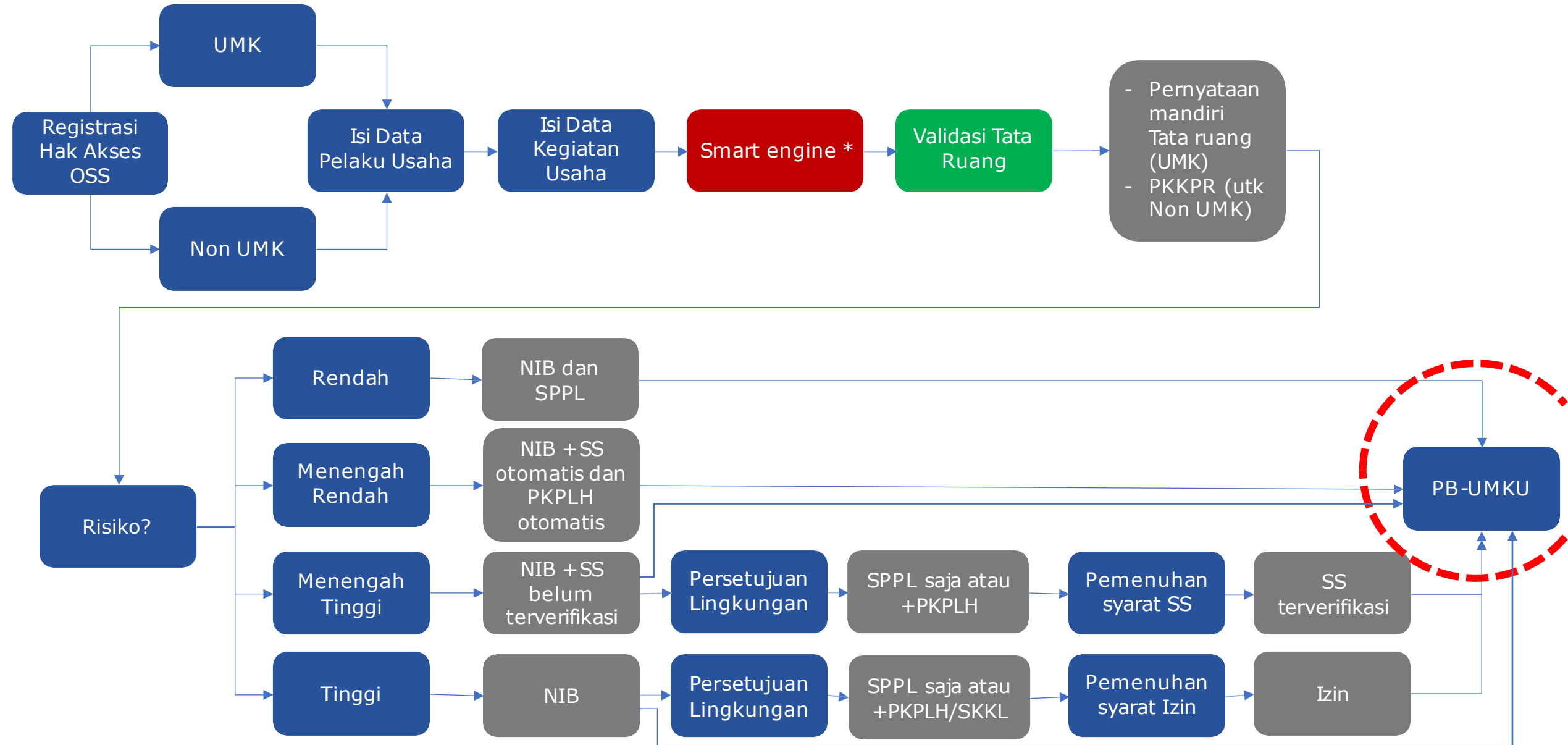
- (1) Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan oleh Pelaku Usaha yang termasuk dalam kelompok UMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b, tidak melalui proses penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Pelaku UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat pernyataan mandiri bahwa kegiatan usahanya telah sesuai dengan RTR.
- (3) Dalam hal pernyataan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti tidak benar, kegiatan pemanfaatan ruangnya dilakukan pembinaan oleh kementerian/lembaga dan/atau perangkat daerah.



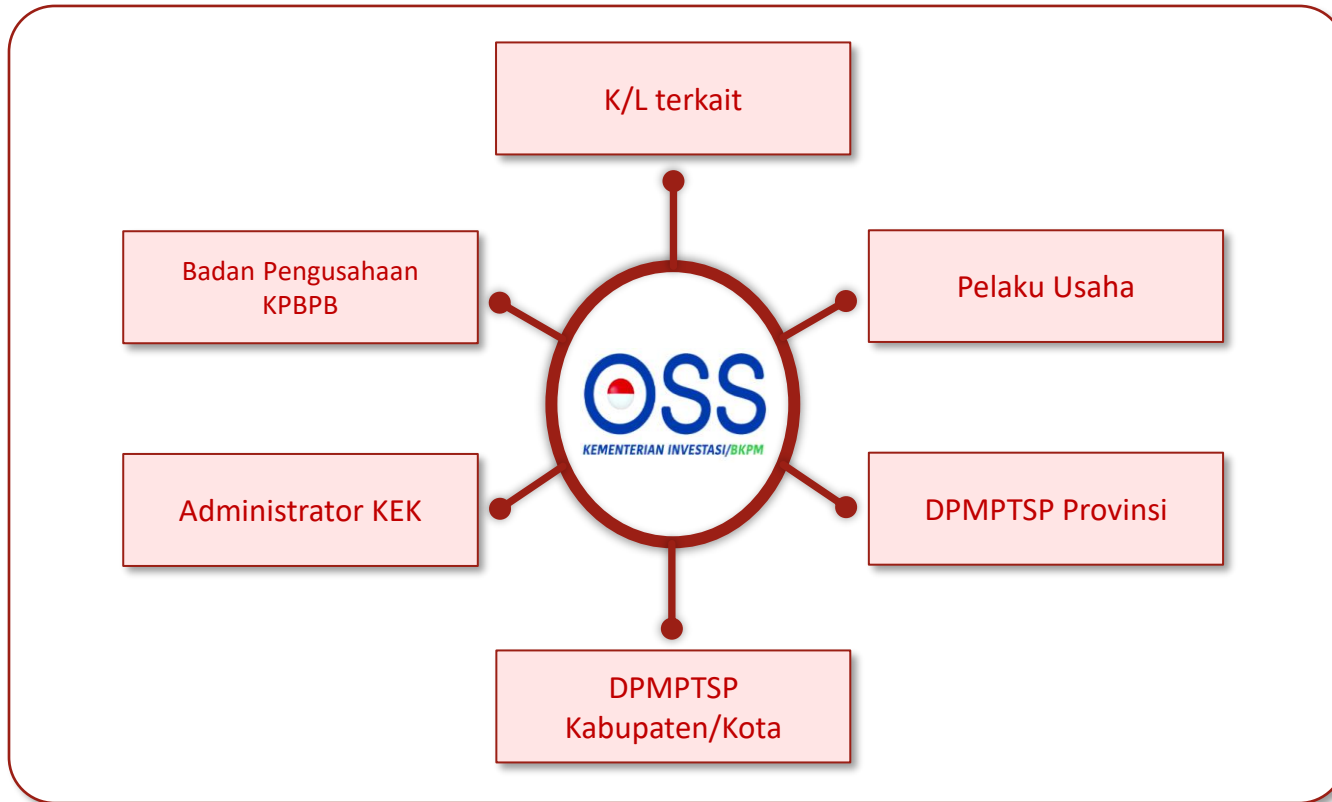
2 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

- 1) Nomor Induk Berusaha (NIB)
- 2) Sertifikat Standar (SS)
- 3) Izin

Gambaran Umum Sistem OSS Berbasis Risiko



Penerima Hak Akses



Amanah PP 5/2021

Subsistem Perizinan Berusaha diakses menggunakan hak akses oleh:

- Pelaku Usaha;
- Lembaga OSS;
- kementerian/l embaga;
- DPMPTSP provinsi;
- DPMPTSPkabupaten/kota;
- Administrator KEK; dan
- Badan Pengusahaan KPBPB.

Pengelola hak akses dapat memberikan hak akses turunan sesuai kewenangan dan kebutuhan yang diperlukan. (Penjelasan Pasal 171 PP 5/2021)

Pasal 11 ayat 2 (perBKPM no. 3/2021)

>> Hak Akses juga diberikan kepada pengelola Kawasan Industri (KI) dalam penerbitan RKL-RPL rinci

Perizinan Berusaha (Teknis)

PELAKU USAHA EKSISTING (sudah memiliki izin yang masih berlaku)

Pasal 97

- (1) Pelaku Usaha yang telah memiliki Perizinan Berusaha yang masih berlaku sebelum Peraturan Badan ini diundangkan tetap dapat digunakan sesuai kegiatan usaha.
- (2) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Perizinan Berusaha yang masih berlaku sebelum Peraturan Badan ini diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan belum memiliki NIB, Pelaku Usaha wajib mendaftarkan NIB melalui Sistem OSS.

Peraturan BKPM No. 4 Tahun 2021



Pelaku Usaha Eksisting – Memiliki Izin Masih Berlaku

NONUMK - Badan Usaha - OSS X

https://perizinan.oss.go.id/#/pengembangan/nonumk/badan-usaha/form

90%

FORMULIR PEREKAMAN DATA PELAKU USAHA (Badan Usaha)

Pilih Bidang Usaha

No	KBLI	Judul KBLI	Uraian Usaha	Ruang Lingkup
Data tidak tersedia				

Apakah sudah memiliki perizinan berusaha yang masih berlaku dan diterbitkan sebelum implementasi OSS Berbasis Risiko (OSS 1.0, OSS 1.1, SPIPISE, dsb) ?

Sudah

Nama Penerbit Izin: Nama Penerbit Izin

Tanggal Terbit (dd-mm-yyyy): Tanggal Terbit

Nomor Izin: Nomor izin

Lampiran File: Pilih Dokumen

Ukuran maksimal dokumen : 5 MB
Jenis dokumen: PDF

Apakah Anda memiliki NPWP berbeda/cabang di lokasi ini?

Pilih

Pelaku Usaha Eksisting – Produk



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: [REDACTED]

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A. Tabel Kegiatan Usaha yang Memiliki Perizinan Berusaha yang Berlaku Efektif sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	07295	Pertambangan Bijih Nikel	[REDACTED]	Nama Penerbit Izin: Drs. H. MASMUDDIN, M.Si. Nomor Izin: [REDACTED] Tanggal terbit: 08 Desember 2020

B. Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	77395	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi serta Peralatannya	[REDACTED]	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha

Perizinan Berusaha Untuk Mendukung Kegiatan Usaha (PB UMKU)

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)



“**Saat ini sebanyak 551 Jenis PB UMKU (Non Transaksional) yang telah dapat diproses melalui sistem OSS Berbasis Risiko**”

Transaksional

Perizinan yang satu kali pakai, durasi berlaku pendek

Tidak diajukan di OSS (diajukan di KLD)

Contoh :
izin ekspor/impor
Untuk perizinan ekspor impor akan dilayani INSW

Non Transaksional

Perizinan yang dapat digunakan atas kegiatannya, durasi izin Panjang

Diajukan di OSS

Contoh :
Sertifikat Cara Pembuatan Alat Kesehatan yang Baik (CPAKB)
Pelepasan/Pendaftaran Varietas

Metode Pemrosesan PB UMKU (Non Transaksional)



INTEGRASI

- Integrasi (SSO) antara OSS dan sistem KL



SISTEM OSS (PUSAT)

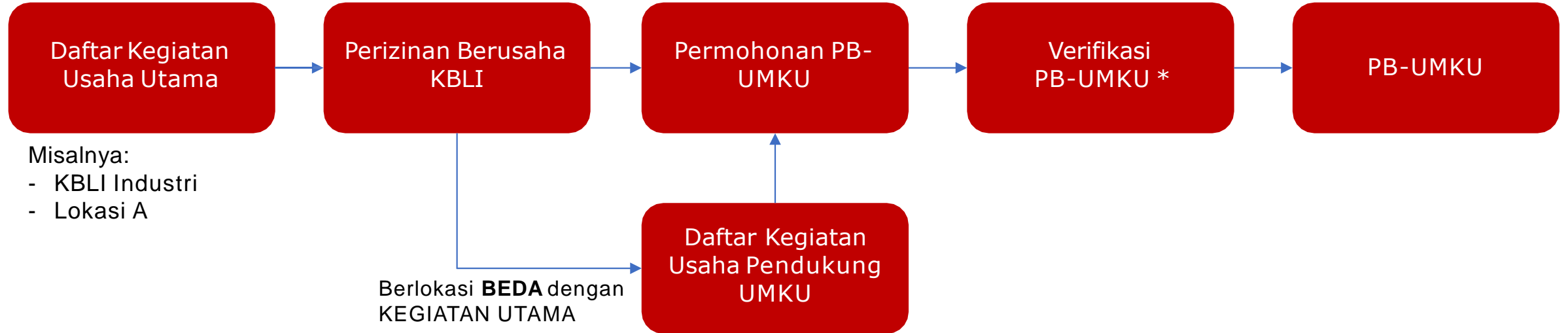
- Melalui Hak Akses OSS
- Dapat mengakomodir lampiran data teknis



SISTEM OSS (DAERAH)

- Melalui Hak Akses OSS
- Dapat mengakomodir lampiran data teknis

Alur Permohonan PB-UMKU



*) Dalam hal verifikasi kewenangan Daerah, maka verifikasi dilakukan oleh OPD Teknis untuk kemudian disetujui/ditolak oleh PTSP



PRODUK PRINT OUT
PBUMKU

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA

.....
PBUMKU: (21 digit)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU) yang merupakan ... kepada pelaku usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha :
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) :
3. Alamat Kantor :Kode Pos :
4. Status Penanaman Modal : PMDN/PMA
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) :
6. Lokasi Usaha :

Telah memenuhi persyaratan:

.....
Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal :

Perubahan ke- Tanggal :(terisi bila melakukan perubahan)

a.n. MENTERI/KEPALA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL



(NAMA)

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PRODUK PRINT OUT
LAMPIRAN
PBUMKU

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA

.....
LAMPIRAN PBUMKU: (17 digit)

Lampiran berikut memuat data teknis untuk:

Data Teknis

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Update Fitur

Fitur Bantuan Kendala Akun

Masuk

Nomor Ponsel, Email, atau Username


Wajib diisi

Kata Sandi

Wajib diisi

Butuh Bantuan?

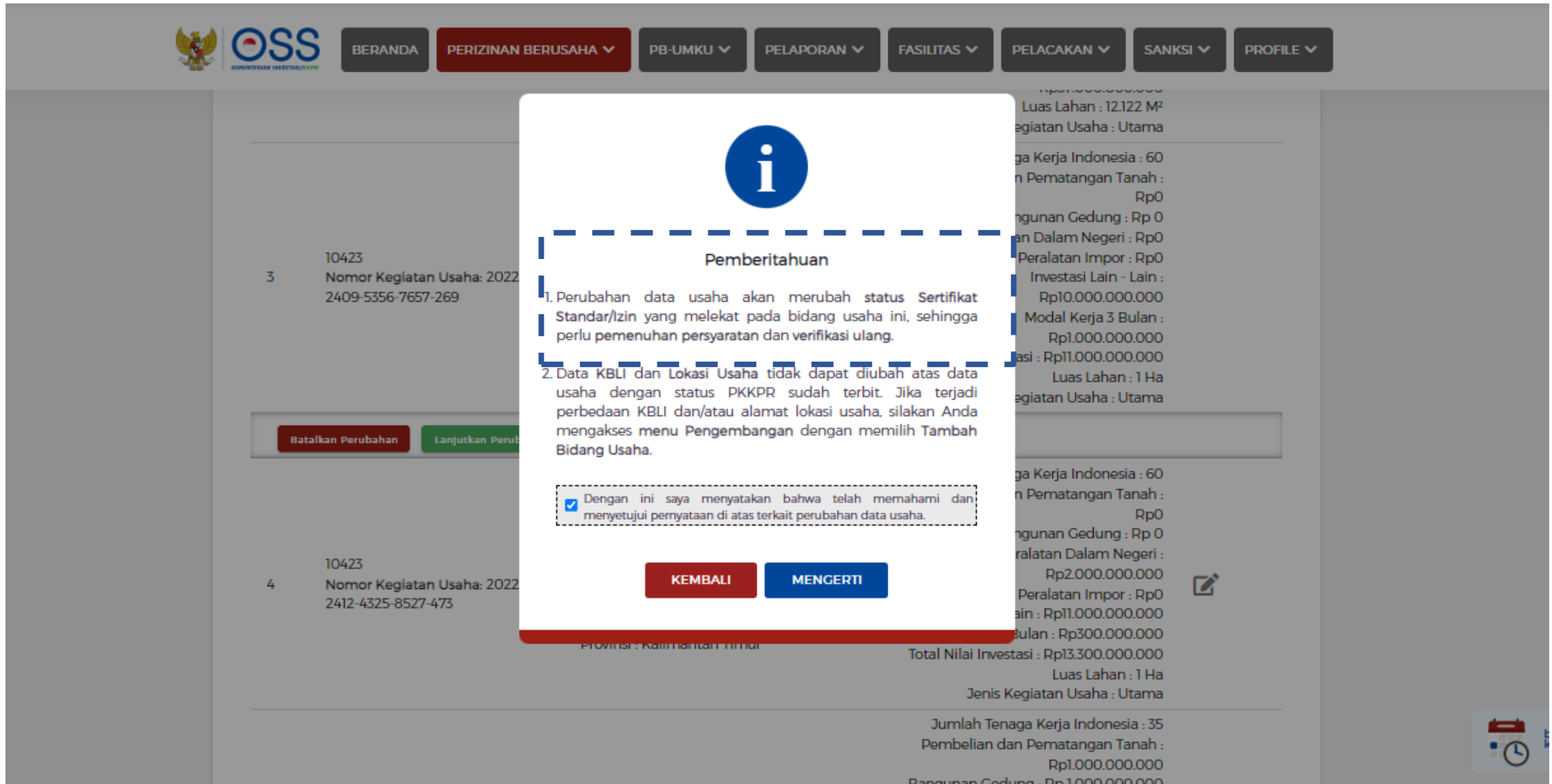
Masuk



Butuh Bantuan?

- Lupa Kata Sandi**
Saya ingin mengatur ulang kata sandi untuk mengakses OSS. >
- Lupa Akun**
Saya lupa akun yang digunakan untuk mengakses OSS. >
- Email Sudah Tidak Aktif**
Saya ingin ubah email untuk akun OSS. >
- Nomor Ponsel Sudah Tidak Aktif**
Saya ingin ubah nomor ponsel untuk akun OSS (Khusus UMK Perseorangan). >

Masuk



The screenshot displays the OSS (Online Single Submission) portal interface. At the top, there is a navigation bar with the OSS logo and several menu items: BERANDA, PERIZINAN BERUSAHA (highlighted), PB-UMKU, PELAPORAN, FASILITAS, PELACAKAN, SANKSI, and PROFILE. The main content area shows a list of business activities. Two entries are visible:

- Entry 3: Nomor Kegiatan Usaha: 2022-2409-5356-7657-269
- Entry 4: Nomor Kegiatan Usaha: 2022-2412-4325-8527-473

A modal dialog box titled "Pemberitahuan" (Notification) is centered on the screen. It contains the following text:

Pemberitahuan

1. Perubahan data usaha akan merubah status Sertifikat Standar/Izin yang melekat pada bidang usaha ini, sehingga perlu pemenuhan persyaratan dan verifikasi ulang.
2. Data KBLI dan Lokasi Usaha tidak dapat diubah atas data usaha dengan status PKKPR sudah terbit. Jika terjadi perbedaan KBLI dan/atau alamat lokasi usaha, silakan Anda mengakses menu Pengembangan dengan memilih Tambah Bidang Usaha.

Below the text, there is a checkbox with the text: "Dengan ini saya menyatakan bahwa telah memahami dan menyetujui pernyataan di atas terkait perubahan data usaha." The checkbox is checked.

At the bottom of the dialog box, there are two buttons: "KEMBALI" (Return) and "MENGERTI" (Acknowledge).

Update Fitur Perubahan Data Usaha

FORMULIR PEREKAMAN DATA PELAKU USAHA (Badan Usaha)

Detail Usaha

No	KBLU	Judul KBLU	Usaian Usaha	Ruang Lingkup
1	10215	Industri Pembekuan Ikan	Kelompok ini mencakup usaha pengawetan ikan (bersifat/pisces) melalui proses pembekuan, seperti ikan bandeng beku, ikan tuna/cakalang beku dan kakap beku. Termasuk juga ikan utuh maupun dipotong (fillet, ikan sagu, steak, chunk, brown meat) yang dibekukan. Kegiatan ini tidak termasuk usaha pendinginan ikan dengan es yang dimaksud untuk mempertahankan kesegaran ikan tersebut (02077).	Seluruh (KKP)

Apakah sudah memiliki perizinan berusaha yang Berlaku Efektif sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?

Apakah Anda memiliki NPWP berbeda/cabang di lokasi ini?

Nama Usaha / Kegiatan:

Apakah Kegiatan Usaha ini berada di lokasi yang sama dengan kegiatan usaha sebelumnya?

Lokasi Kegiatan Usaha: Daratan Hutan Laut

Apakah lokasi usaha lintas darat-laut?

Luas Lahan Usaha:

Lampiran File Polygon:
Hapus mengupload Shape File Polygon Koordinat yang anda muhikan dengan format berikut (gunakan koordinat UTM) dan lingkup (Shape) System Koordinat WGS 84. (Pilih Menu Edit Arah)

Apakah Anda sudah menguasai lahan tersebut?

Status Lahan Anda:

Data lain lokasi dan bukti penguasaan lahan: (Dapat berupa HGU, HGB, Sewatuk, atau bukti lain yang Anda miliki)

Nama Pejabat Pemberit Izin: Tanggal Terbit (dd-mm-yyyy):
 Nomor Izin: Tanggal habis masa berlaku (dd-mm-yyyy) (opsional):

Lampiran File:

Sudah Ada Bangunan? Sudah Belum

Apakah memerlukan bangunan baru untuk kegiatan usaha ini? Ya Tidak

Pilih status bangunan usaha:

Detail Pengisian Bangunan

Rencana Jumlah Bangunan Anda:

Rencana Jumlah Lantai Bangunan:

Rencana Luas Lantai Bangunan:

Masukan Jumlah Bangunan Anda:

Masukan Jumlah Bangunan Anda yang Sudah Memiliki IMB:

Rencana teknis bangunan/rencana induk kawasan:
Ukuran maksimal dokumen: 5 MB. Jenis dokumen: PDF

Apakah lokasi usaha berada dalam lintas Provinsi/Kabupaten/Kota? Ya Tidak

Alamat Usaha:

Provinsi:

Kabupaten / Kota:

Apakah lokasi usaha berada di kawasan?
Kawasan Industri, Kawasan Perkotaan Khusus, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Nama kawasan:

Kode Pos:

Apakah kegiatan usaha merupakan rencana pembangunan dan pengembangan Objek Vital Nasional?

Data Investasi untuk Bidang Usaha

Pembelian dan Pematangan Tanah:

Bangunan / Gedung:

Mesin / Peralatan Dalam Negeri:

Mesin / Peralatan Impor:

Mesin / Peralatan:

Investasi Lain - Lain:

Total Modal Tetap:

Modal Kerja 3 Bulan:

Total Nilai Investasi:

Skala usaha Anda atas kegiatan ini adalah Besar. Tingkat risiko kegiatan usaha Anda adalah Menengah-Tinggi

Deskripsi Kegiatan Usaha:

Jangka Waktu Perkiraan Beroperasi/Produksi:

Tenaga Kerja Indonesia (Laki - Laki):

Tenaga Kerja Indonesia (Perempuan):

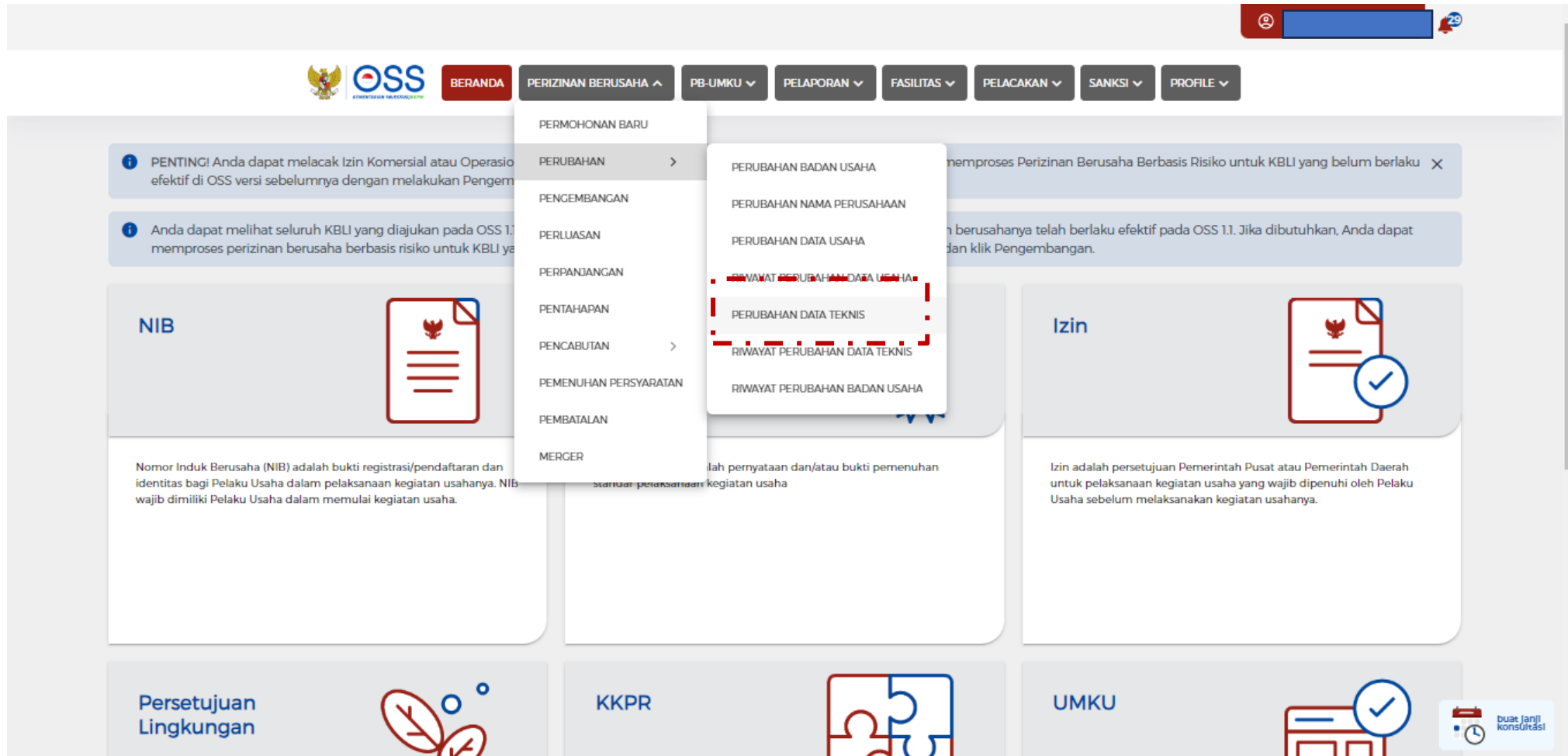
Jumlah Tenaga Kerja Indonesia:

Jumlah Tenaga Kerja Asing:

Daftar Produk/Jasa

No	KBLU	Kapasitas	Satuan	Jenis Produksi
1	10215	250		STEAK, LOIN, GROUNDMEAT, SAKU
2	10215	4.000		IKAN UTUH (WRI), IKAN WOGS, IKAN FILLET

Data terkait lokasi usaha tidak dapat diubah, perubahan lokasi menggunakan mekanisme input data baru melalui menu pengembangan



The screenshot displays the OSS portal interface. At the top, there is a navigation bar with the OSS logo and several menu items: BERANDA, PERIZINAN BERUSAHA, PB-UMKU, PELAPORAN, FASILITAS, PELACAKAN, SANKSI, and PROFILE. A dropdown menu is open under 'PERIZINAN BERUSAHA', listing various options. The 'PERUBAHAN' option is selected, and its sub-menu is visible, containing: PERUBAHAN BADAN USAHA, PERUBAHAN NAMA PERUSAHAAN, PERUBAHAN DATA USAHA, ~~RIWAYAT PERUBAHAN DATA USAHA~~, PERUBAHAN DATA TEKNIS (highlighted with a red dashed box), RIWAYAT PERUBAHAN DATA TEKNIS, and RIWAYAT PERUBAHAN BADAN USAHA. The main content area features several informational cards: 'PENTING!' regarding license tracking, 'Anda dapat melihat seluruh KBLI...', 'NIB' (Nomor Induk Berusaha) with a document icon, 'Izin' (License) with a document icon and a checkmark, 'Persetujuan Lingkungan' (Environmental Approval) with a leaf icon, 'KKPR' (Kawasan Industri Kawasan Perkotaan Rural) with a puzzle icon, and 'UMKU' (Unit Manufaktur Kecil) with a factory icon. A 'buat janji konsultasi' (make an appointment for consultation) button is located in the bottom right corner.

*Menu perubahan data lampiran teknis ini hanya untuk **data yang tercantum dalam lampiran teknis** dan tidak terkait dengan elemen data isian dalam form permohonan Perizinan Berusaha.*

Pilihan Pendukung apabila KBLI Utama sudah terbit NIB

PEMILIHAN BIDANG USAHA ✕

Berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020

Jenis Kegiatan Usaha

Pendukung

Bidang Usaha Utama

Bidang Usaha Utama

Pilih

09900 - NKU : 202208-0111-0733-4166-370

JL RAYA MUCHTAR Kelurahan: Sawangan Baru Kecamatan: Sawangan Kab/Kota: Kota Depok Provinsi: Jawa Barat

🔍 Masukkan kata kunci atau kode KBLI

Pilihan jenis Kegiatan Pendukung *hanya muncul* apabila KBLI Utama sudah terbit NIB

Produk

NIB

No	KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Tinggi	NIB	Terbit	Detail
4	10412 (Utama)	Industri Margarine	samadua utama, Desa/Kelurahan Dalam, Kec. Samadua, Kab. Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Kode Pos: 25123	Tinggi	NIB Izin	Terbit	melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
5	10411 (Pendukung)	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati	samadua pendukung, Desa/Kelurahan Dalam, Kec. Samadua, Kab. Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Kode Pos: 25123	Tinggi	NIB Izin	Terbit	melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



SS/Izin



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 81200019723690183

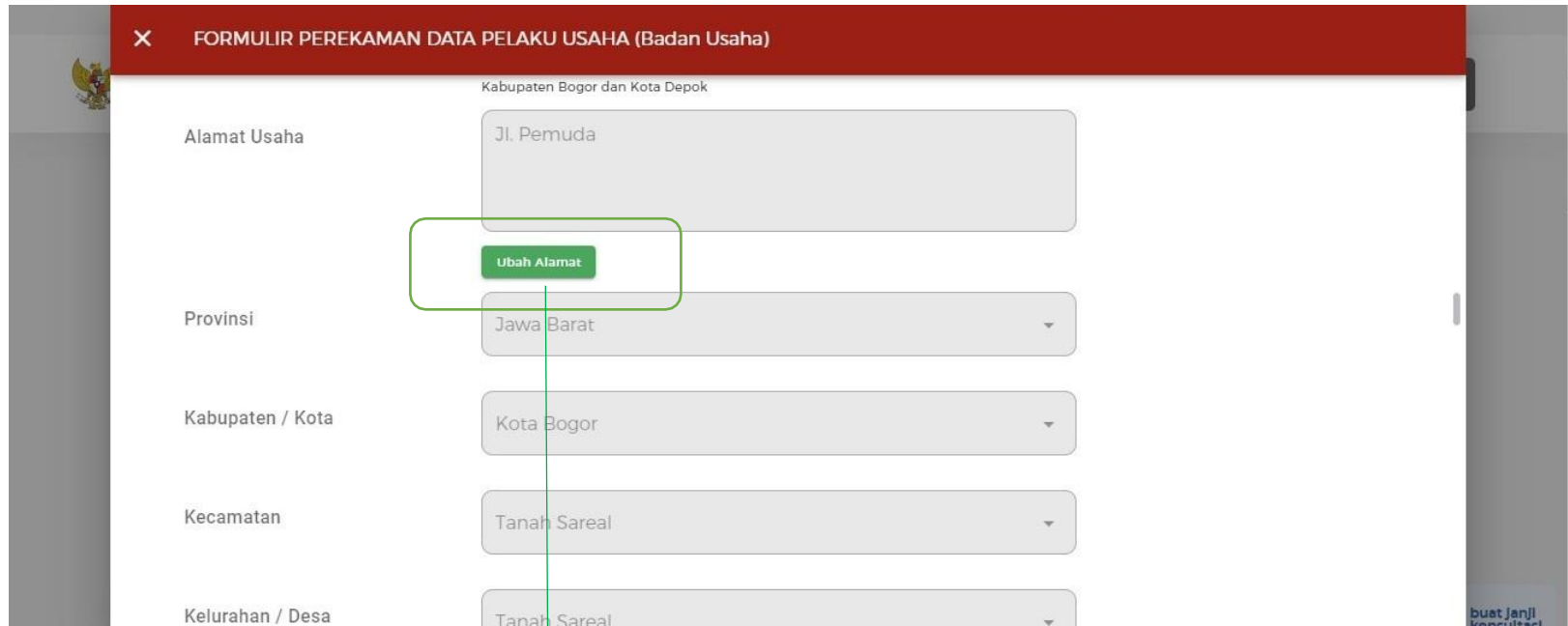
Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Pengawas	Masa Berlaku
17012 (Pendukung)	Industri Kertas Budaya	Menengah Rendah	<p>Persyaratan:</p> <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional; - Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; - Memenuhi Standar Industri Kertas Budaya; - Memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara wajib). 	Pemystaan Mandiri	Pemerintah Kabupaten Kerinci	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

- Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
- Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
- Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
- Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

Fitur koreksi alamat usaha atas KKPR yang sudah terbit

1. Adanya Permohonan perubahan atas alamat yaitu hanya perubahan nama Gedung
2. Adanya kemungkinan perubahan nama jalan dll namun tidak berubah posisi/ koordinat karena kebijakan pemerintah (bukan karena pemekaran)




- Klik menu perubahan data usaha
- Hanya bisa mengubah alamat, data kode pos, provinsi, kab/kota, kecamatan dan kel/desa terkunci
- Permohonan ini masuk di akun verifikator 181
- Bila telah disetujui alamat akan memutakhirkan alamat pada PD dan PB

6

Penyesuaian bisnis proses Pengajuan UMKU yang membutuhkan persyaratan dasar KKPR/Persetujuan Lingkungan

Fitur yang digunakan pelaku usaha apabila membutuhkan UMKU di lokasi yang berbeda dengan kegiatan usaha utamanya yang membutuhkan persyaratan dasar KKPR/Persetujuan Lingkungan



Apakah Perizinan Berusaha UMKU yang diajukan membutuhkan persyaratan dasar (KKPR/Persetujuan Lingkungan)

Tidak
Anda akan diarahkan untuk langsung mengisi formulir pengajuan Perizinan Berusaha UMKU.

Ya
Anda akan diarahkan untuk mengisi data kegiatan usaha dengan jenis Pendukung UMKU. Kemudian, mengajukan Perizinan Berusaha UMKU

KembaliLanjut

Pengajuan UMKU di lokasi berbeda

Detail Usaha

Pilih Bidang Usaha

No	KBLI	Judul
----	------	-------

Apakah Anda memiliki NPWP berbeda/cabang di lokasi ini?

Nama Usaha / Kegiatan

Apakah Kegiatan Usaha ini berada di lokasi yang sama dengan kegiatan usaha sebelumnya?

Lokasi Kegiatan Usaha

Luas Lahan Usaha

Sudah Ada Bangunan ?

Apakah memerlukan bangunan baru untuk kegiatan usaha ini ?

Detail Pengisian Bangunan

PEMILIHAN BIDANG USAHA

Berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020

Jenis Kegiatan Usaha
Pendukung UMKU

Bidang Usaha Utama
Bidang Usaha Utama
46653 - NKU : 202211-1416-2556-8609-574
JL. BASRI NO. 3432 Kelurahan: Buluh Kasab Kecamatan: Maro Sebo Ulu Kab/Kota: Kab. Batanghari Provinsi: Jambi

Bidang Usaha
Masukkan kata kunci atau kode KBLI

Wajib diisi
Contoh
- KBLI 52101 untuk Tanda Daftar Gudang

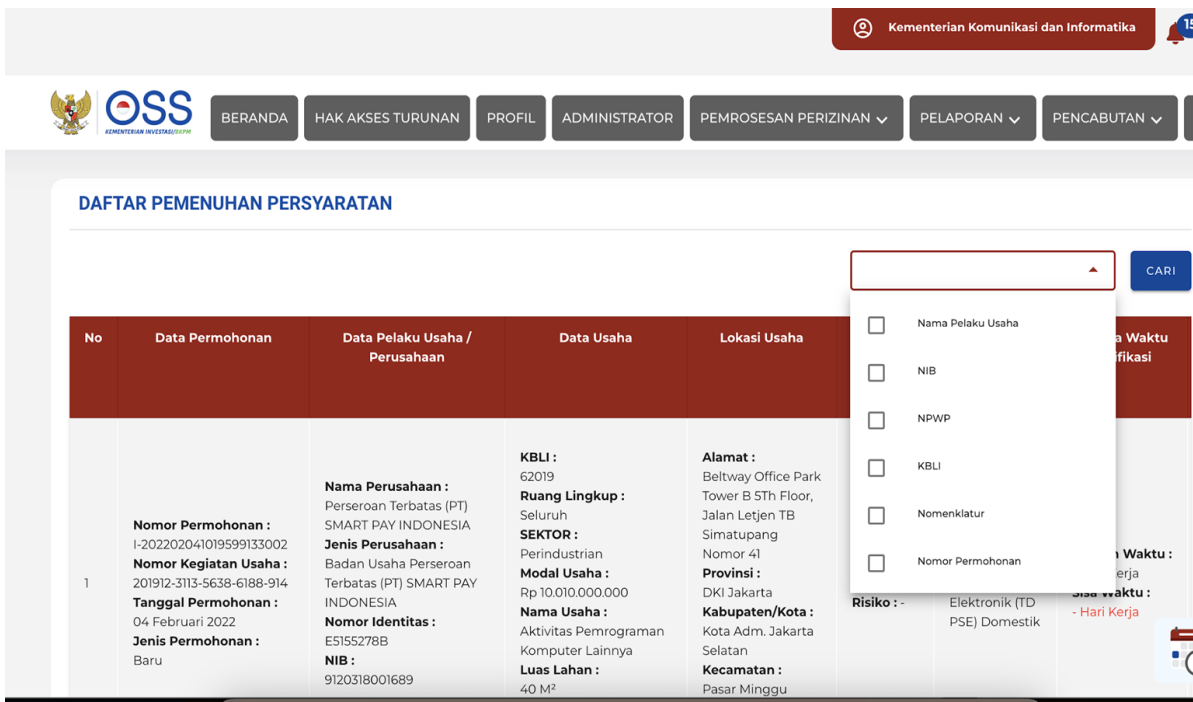
Ruang Lingkup Kegiatan
Pilih ruang lingkup kegiatan

Batalan Simpan

7

Penambahan filter multi pencarian pada akun verifikator dan persetujuan K/L/D

K/L/D melalui hak akses OSS dapat melakukan pencarian data perusahaan menggunakan mekanisme multi pencarian dengan memilih beberapa parameter yang akan dilakukan pencarian



Kementerian Komunikasi dan Informatika

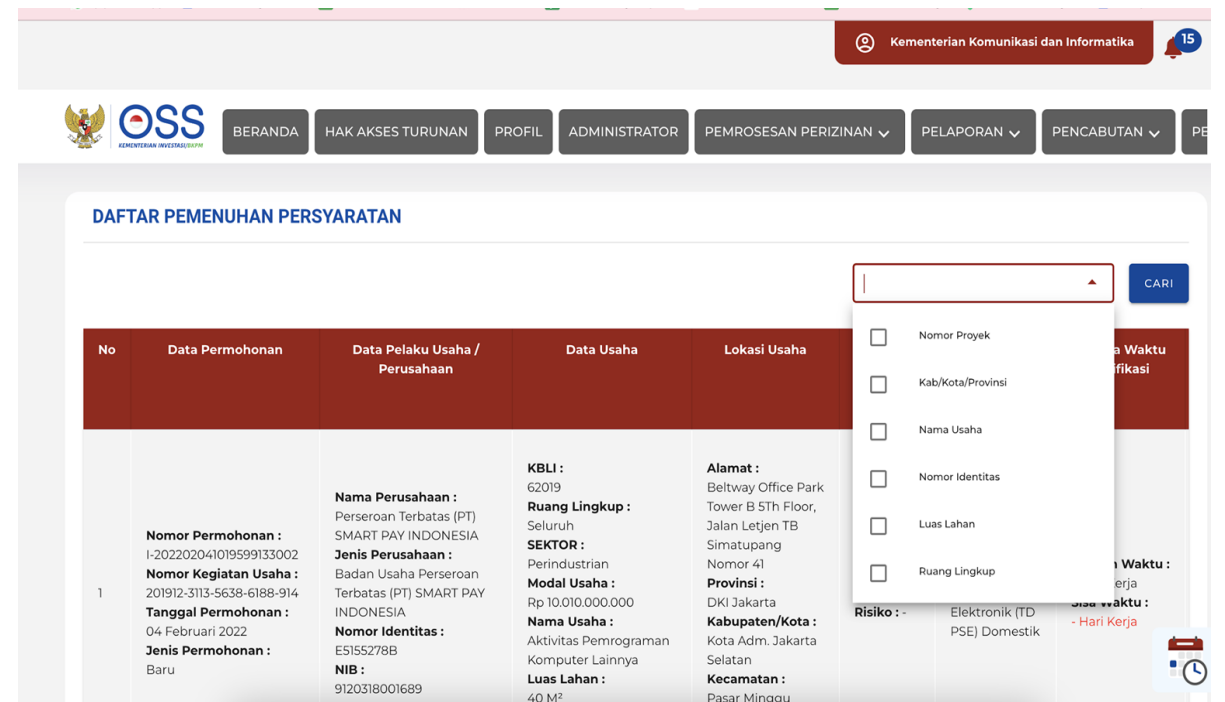
BERANDA HAK AKSES TURUNAN PROFIL ADMINISTRATOR PEMROSESAN PERIZINAN PELAPORAN PENCABUTAN

DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN

No	Data Permohonan	Data Pelaku Usaha / Perusahaan	Data Usaha	Lokasi Usaha
1	<p>Nomor Permohonan : I-202202041019599133002</p> <p>Nomor Kegiatan Usaha : 201912-3113-5638-6188-914</p> <p>Tanggal Permohonan : 04 Februari 2022</p> <p>Jenis Permohonan : Baru</p>	<p>Nama Perusahaan : Perseroan Terbatas (PT) SMART PAY INDONESIA</p> <p>Jenis Perusahaan : Badan Usaha Perseroan Terbatas (PT) SMART PAY INDONESIA</p> <p>Nomor Identitas : E5155278B</p> <p>NIB : 9120318001689</p>	<p>KBLI : 62019</p> <p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>SEKTOR : Perindustrian</p> <p>Modal Usaha : Rp 10.010.000.000</p> <p>Nama Usaha : Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya</p> <p>Luas Lahan : 40 M²</p>	<p>Alamat : Beltway Office Park Tower B 5Th Floor, Jalan Letjen TB Simatupang Nomor 41 DKI Jakarta</p> <p>Kabupaten/Kota : Kota Adm. Jakarta Selatan</p> <p>Kecamatan : Pasar Minggu</p>

Filter dropdown menu options:

- Nama Pelaku Usaha
- NIB
- NPWP
- KBLI
- Nomenklatur
- Nomor Permohonan



Kementerian Komunikasi dan Informatika

BERANDA HAK AKSES TURUNAN PROFIL ADMINISTRATOR PEMROSESAN PERIZINAN PELAPORAN PENCABUTAN

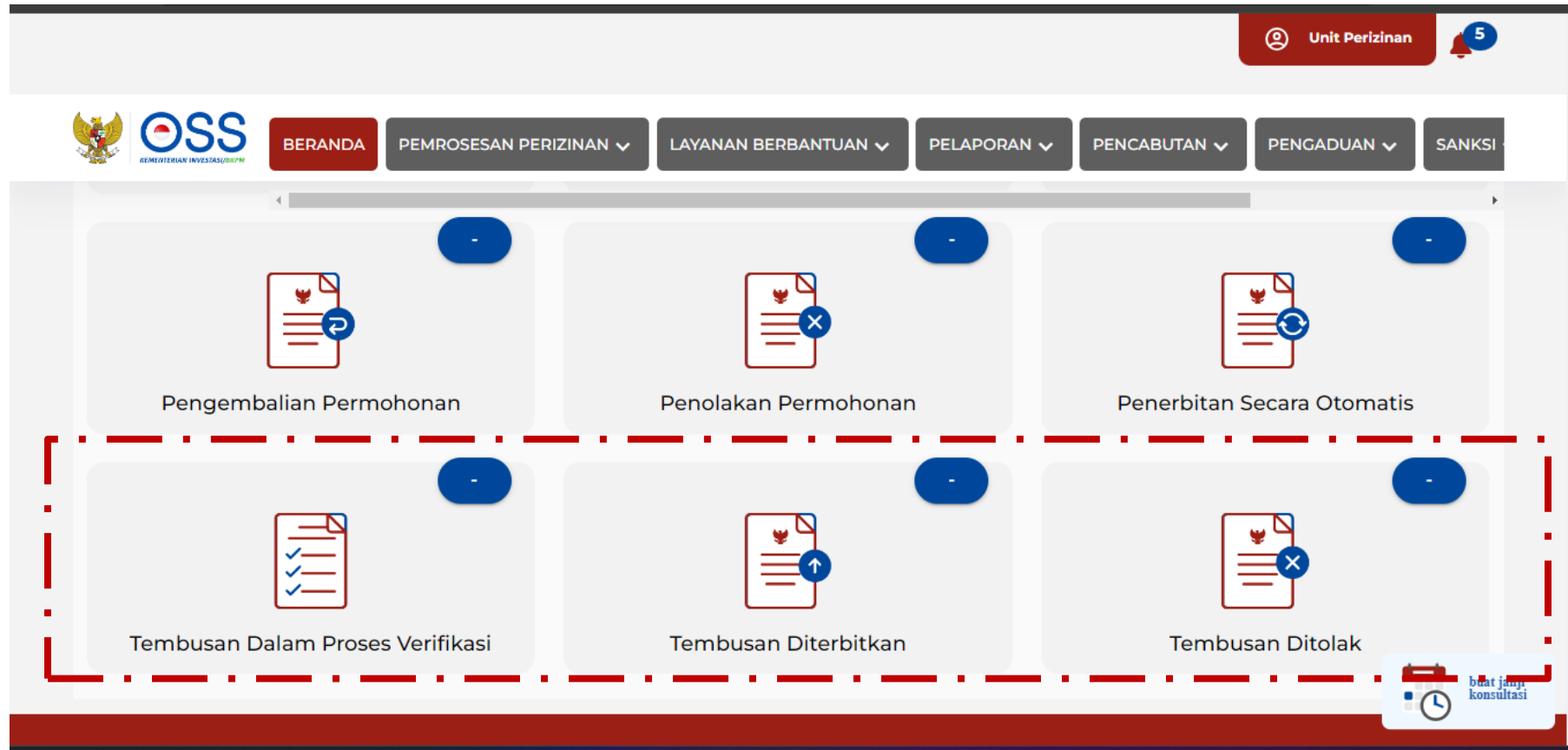
DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN

No	Data Permohonan	Data Pelaku Usaha / Perusahaan	Data Usaha	Lokasi Usaha
1	<p>Nomor Permohonan : I-202202041019599133002</p> <p>Nomor Kegiatan Usaha : 201912-3113-5638-6188-914</p> <p>Tanggal Permohonan : 04 Februari 2022</p> <p>Jenis Permohonan : Baru</p>	<p>Nama Perusahaan : Perseroan Terbatas (PT) SMART PAY INDONESIA</p> <p>Jenis Perusahaan : Badan Usaha Perseroan Terbatas (PT) SMART PAY INDONESIA</p> <p>Nomor Identitas : E5155278B</p> <p>NIB : 9120318001689</p>	<p>KBLI : 62019</p> <p>Ruang Lingkup : Seluruh</p> <p>SEKTOR : Perindustrian</p> <p>Modal Usaha : Rp 10.010.000.000</p> <p>Nama Usaha : Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya</p> <p>Luas Lahan : 40 M²</p>	<p>Alamat : Beltway Office Park Tower B 5Th Floor, Jalan Letjen TB Simatupang Nomor 41 DKI Jakarta</p> <p>Kabupaten/Kota : Kota Adm. Jakarta Selatan</p> <p>Kecamatan : Pasar Minggu</p>


Filter dropdown menu options:

- Nomor Proyek
- Kab/Kota/Provinsi
- Nama Usaha
- Nomor Identitas
- Luas Lahan
- Ruang Lingkup

Tembusan sesuai kewenangan atau lokasi



Unit Perizinan 5

 BERANDA PEMROSESAN PERIZINAN LAYANAN BERBANTUAN PELAPORAN PENCABUTAN PENGADUAN SANKSI

Pengembalian Permohonan

Penolakan Permohonan

Penerbitan Secara Otomatis

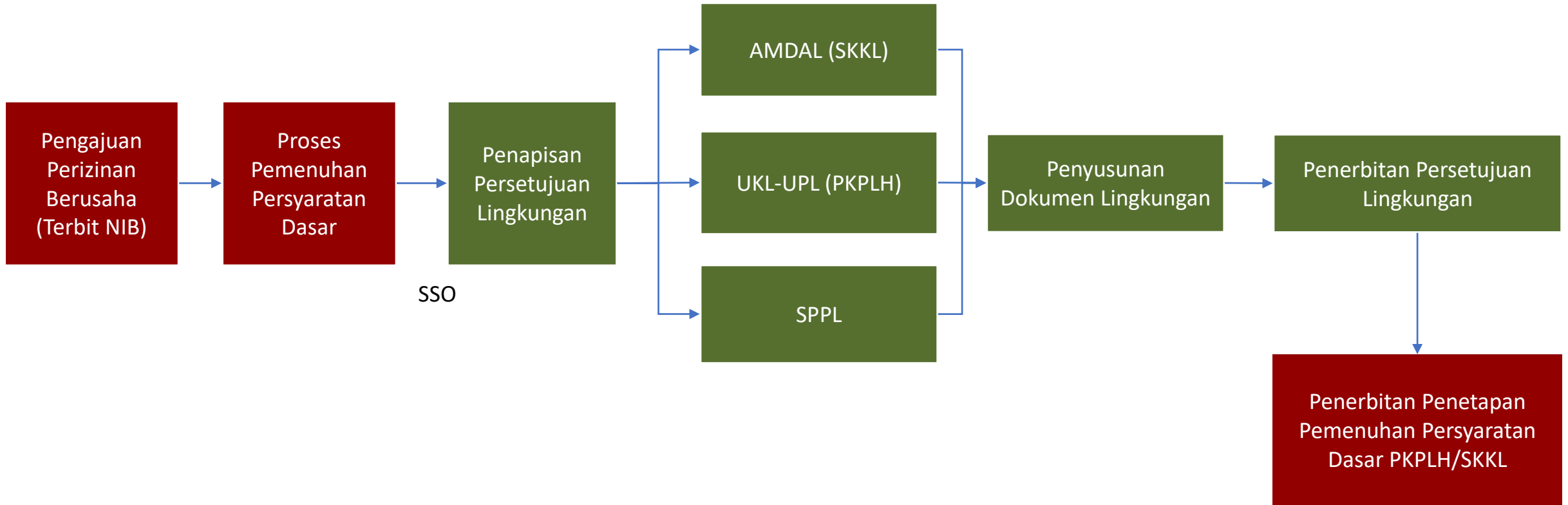
Tembusan Dalam Proses Verifikasi



Tembusan Diterbitkan

Tembusan Ditolak

buat janji konsultasi

Proses Bisnis Satu Siklus Permohonan Persetujuan Lingkungan khusus PB Risiko MT dan T Di luar Kawasan Industri



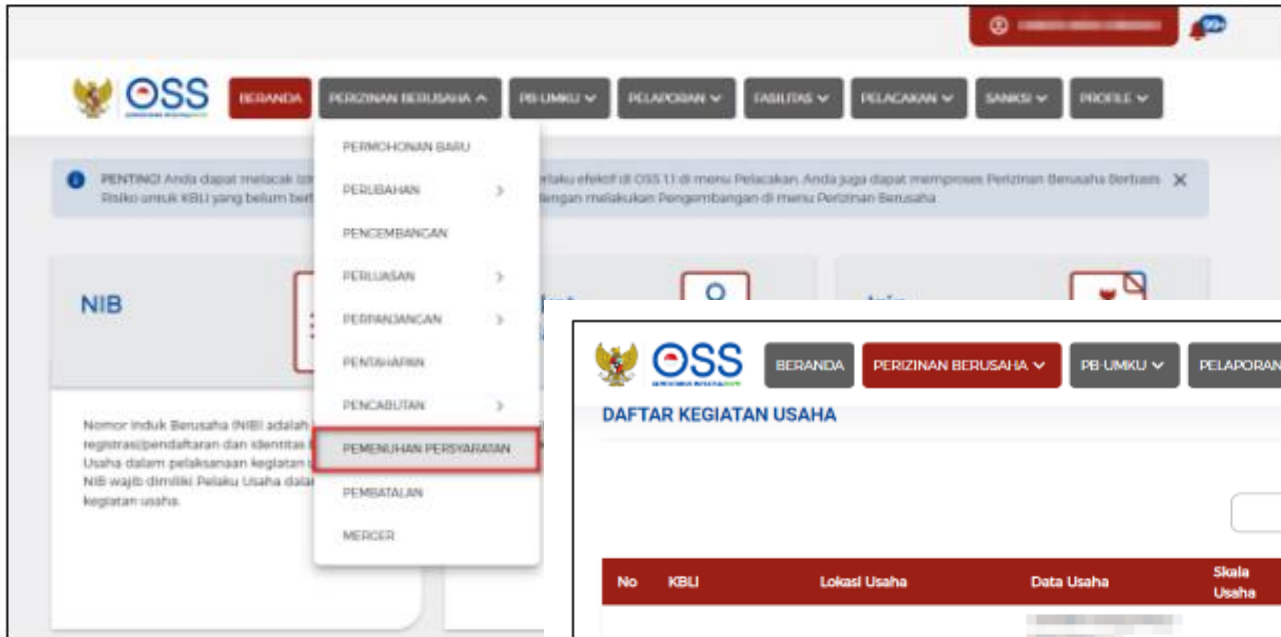
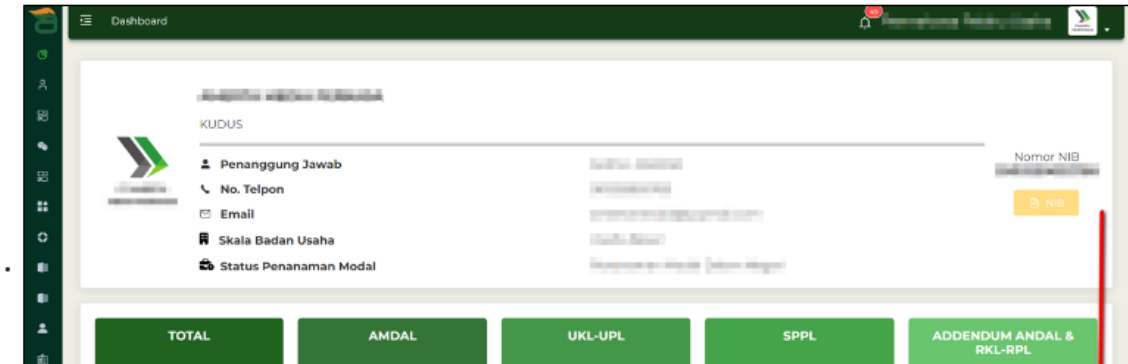
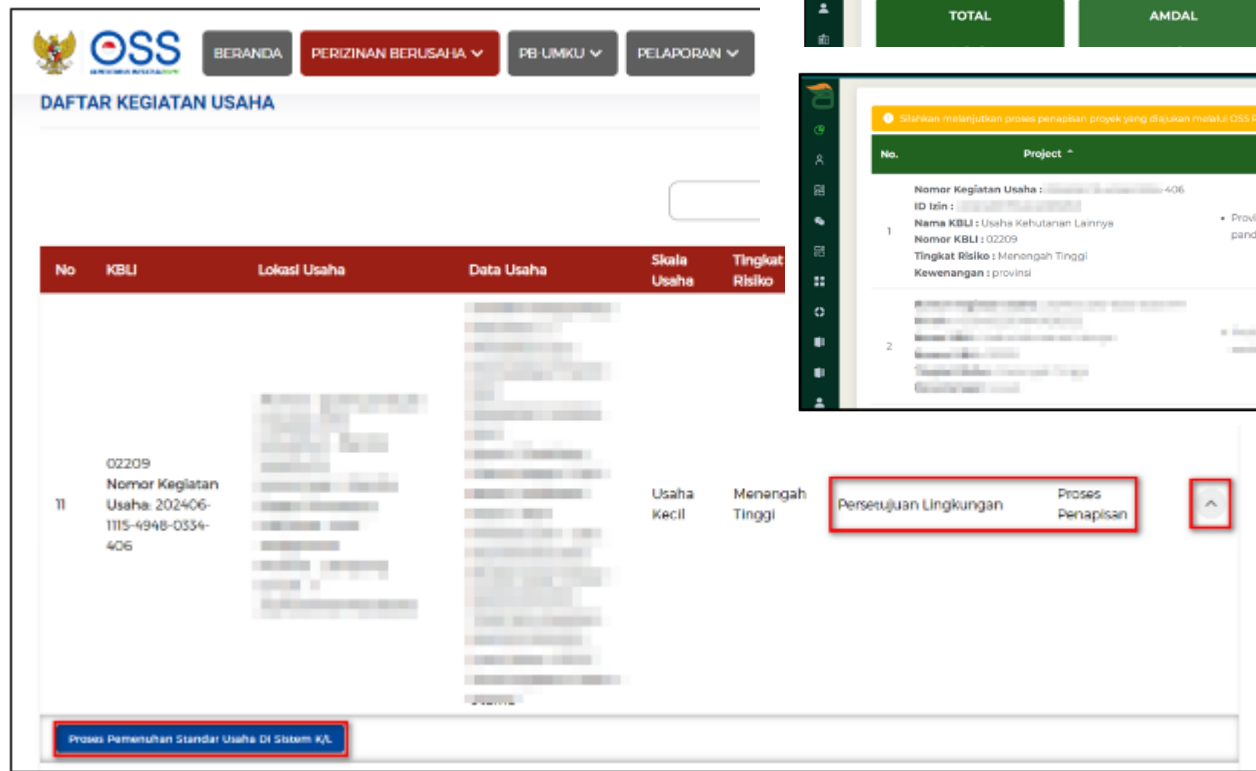
 Proses di OSS-RBA
 Proses di Amdalnet

- Integrasi Amdalnet dengan OSS-RBA pada tahun 2024 untuk pengajuan persetujuan lingkungan baru (*go live* pada Maret 2024)
- Integrasi proses perubahan persetujuan lingkungan, akan dilanjutkan pada tahun 2024

Proses Bisnis Satu Siklus Permohonan Persetujuan Lingkungan khusus PB Risiko MT dan T

1. Proses bisnis yang berlaku: proses pendaftaran dan identifikasi kegiatan usaha dalam pelaksanaan kegiatan usaha.

2. Tahap ke-1: proses pendaftaran dan identifikasi kegiatan usaha dalam pelaksanaan kegiatan usaha.

No	KBLI	Lokasi Usaha	Data Usaha	Skala Usaha	Tingkat Risiko
02209	Usaha: 202406-1115-4948-0354-406			Usaha Kecil	Menengah Tinggi



Panduan SSO Amdalnet dan OSS



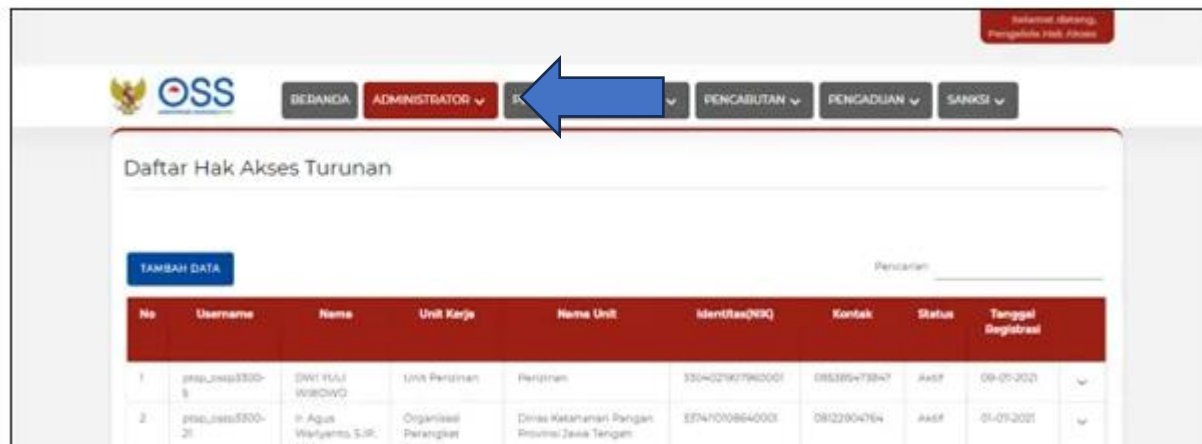
SCAN ME

> Apabila tidak menemukan data permohonan pada akun OPD ?

1. Masuk ke akun Pengelola Hak Akses – menu Administrator

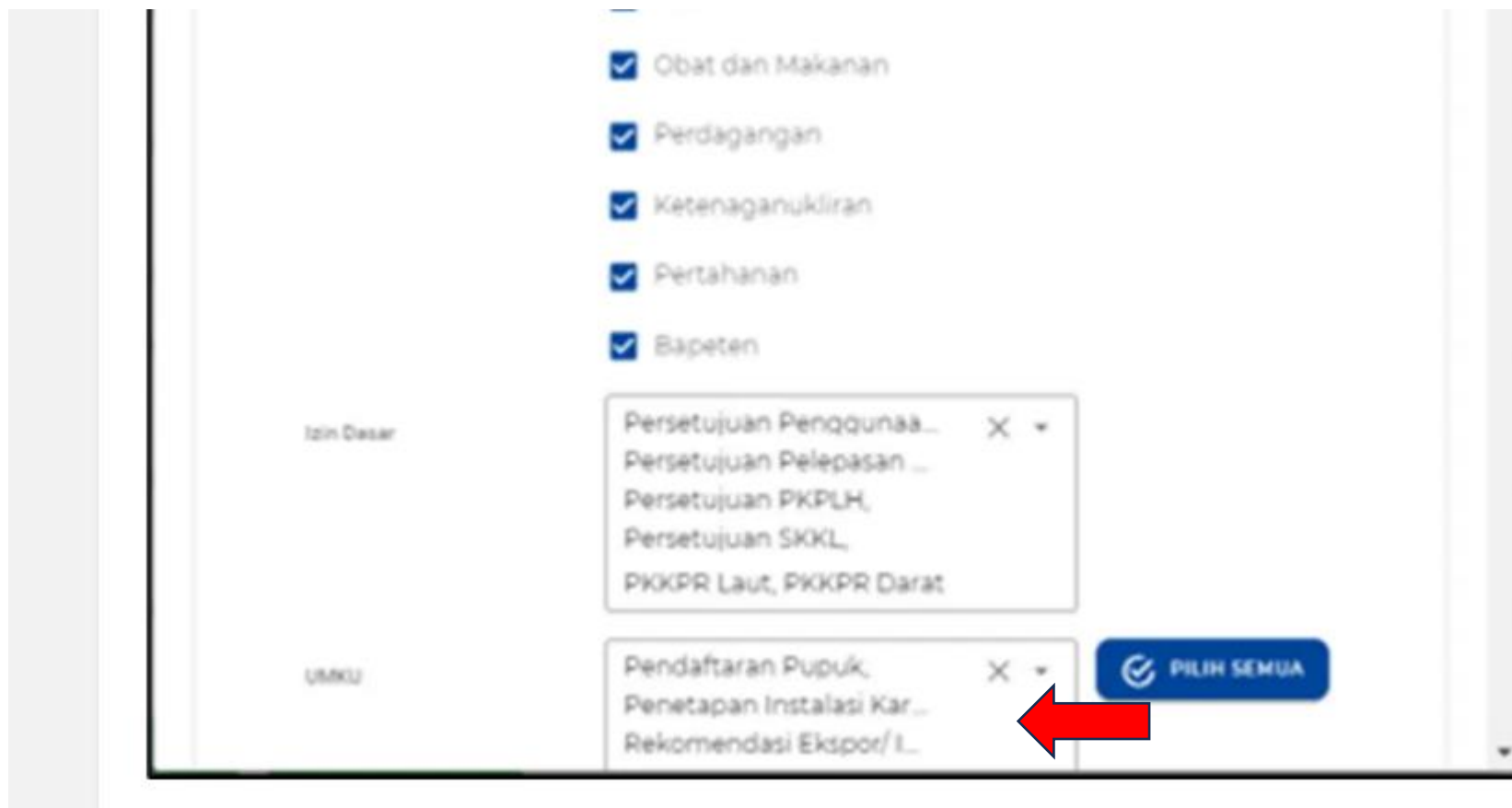


2. Lalu ke Hak Akses Turunan, akan menampilkan Daftar Pengguna Hak Akses



> **Apabila tidak menemukan data permohonan pada akun OPD ?**

3. Mohon dicek bagian tabel Izin Dasar/UMKU, apakah sudah di check list atau belum



MEDIA LAYANAN KONSULTASI OSS BERBASIS RISIKO

► Fasilitasi Bagi Pelaku Usaha Pada Layanan OSS

1



Informasi

2



 OSS Indonesia
 08116774642

3



Email
kontak@oss.go.id

4



Media Sosial

5



Konsultasi
Tatap Muka

6



Call Center
169

7



Konsultasi
Virtual (pengawasan)



KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM

Jalan Jenderal Gatot Subroto
No. 44, Jakarta 12190 - Indonesia

☎ +62 21 525 2008

☎ +62 21 525 4945

✉ info@bkpm.go.id

🖱 bkpm.go.id

🖱 investindonesia.go.id

